



DP3APPKB

RENCANA KERJA TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA SURABAYA



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



www.dp3appkb.surabaya.go.id

RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURABAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	13
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	13
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II	15
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.....	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	49
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	62
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....	62
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	63
2.3.3 Peluang dan Tantangan	64
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	65
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	66
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	103
2.5.1 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Forum Perangkat Daerah	103
2.5.2 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang.....	109
2.5.3 Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan PelayananPerangkat Daerah	110
BAB III.....	111
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	111
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	111

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	113
3.2.1 Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	113
BAB IV	114
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	114
4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan ..	114
4.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	115
4.3 Program dan Kegiatan	116
BAB V	135
PENUTUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Surabaya	27
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	51
Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .	86
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	7
Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bagi seluruh PD untuk menyusun rencana kerja tahun berikutnya sebagai dasar perencanaan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan nantinya tidak terjadi kegagalan, sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang secara substansial menerjemahkan tujuan, sasaran, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMN, RKP Pemerintah Pusat, RPJMD Provinsi, dan RPJPD Pemerintah kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahun terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun setiap lima 5 (lima) tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya bertugas membentuk Keluarga berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memiliki perilaku hidup dan modal sosial yang positif, menyadari arti penting pendidikan, nilai hidup sehat, kepatuhan terhadap hukum, keharusan untuk terus bekerja atau berwirausaha serta menjaga kelestarian lingkungan. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memahami kegunaan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga yang bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan yang terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah serta menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Ranwal Renja PD disusun bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Evaluasi juga dilakukan dengan berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika minimal sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Sesudah Ranwal Renja selesai disusun maka tahap berikutnya yaitu penyusunan Rancangan Renja PD yang merupakan upaya untuk penyempurnaan ranwal renja yang disusun. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Sedangkan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan yang baru, diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah

sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. kemudian Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi kembali paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Setelah Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi maupun kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan menjadi berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Tahap selanjutnya adalah Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disusun sesuai sistematika rancangan Renja Perangkat Daerah.

Tahap terakhir penyusunan Renja adalah Penetapan Renja Perangkat Daerah. Draft Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat

Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya, serta menemukan hal yang perlu disempurnakan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah dan berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah disempurnakan rancangan akhir Renja disampaikan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, kemudian dilakukan Verifikasi lagi paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perencanaan anggaran tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

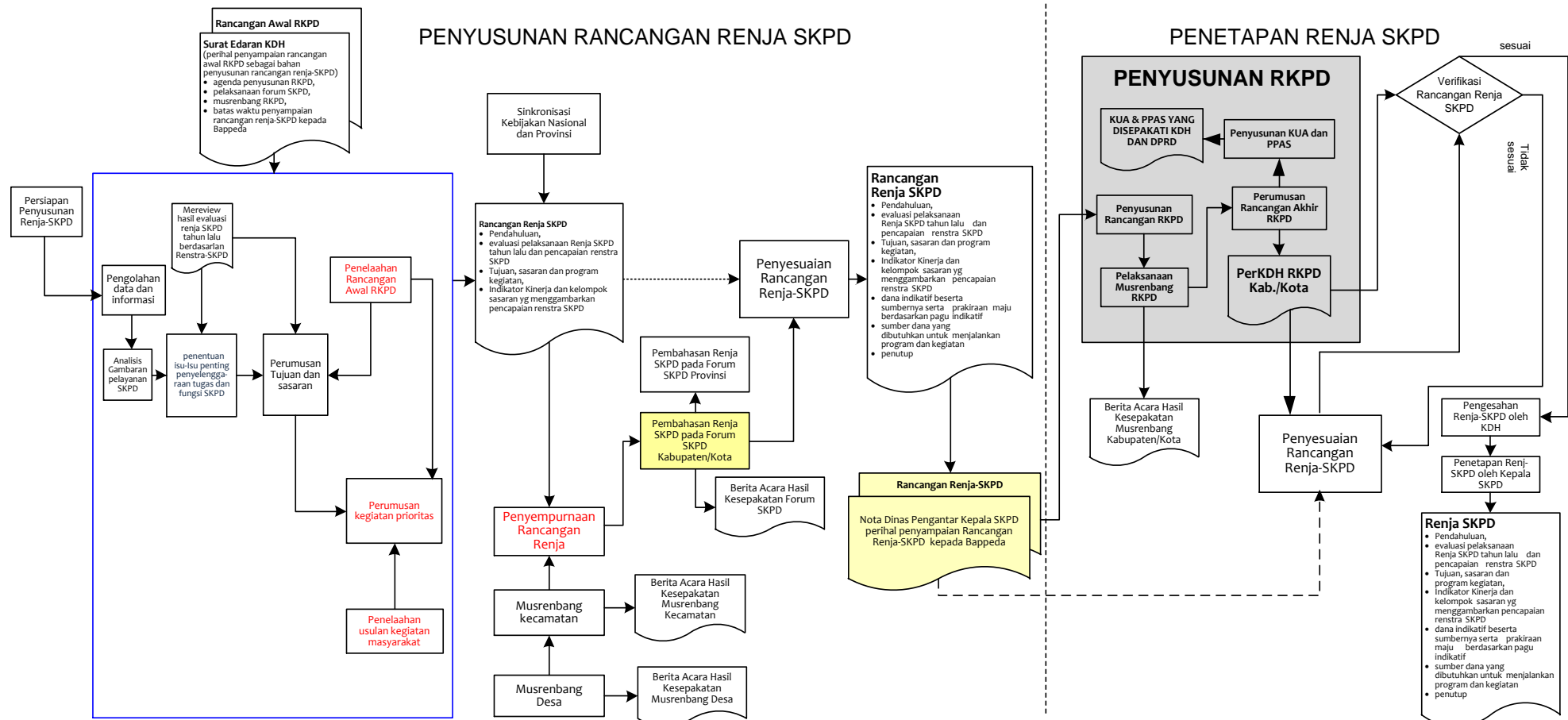
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Untuk menyusun RPJMD Kota juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan mengacu pada RPJM Provinsi melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Kementerian/Lembaga serta dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

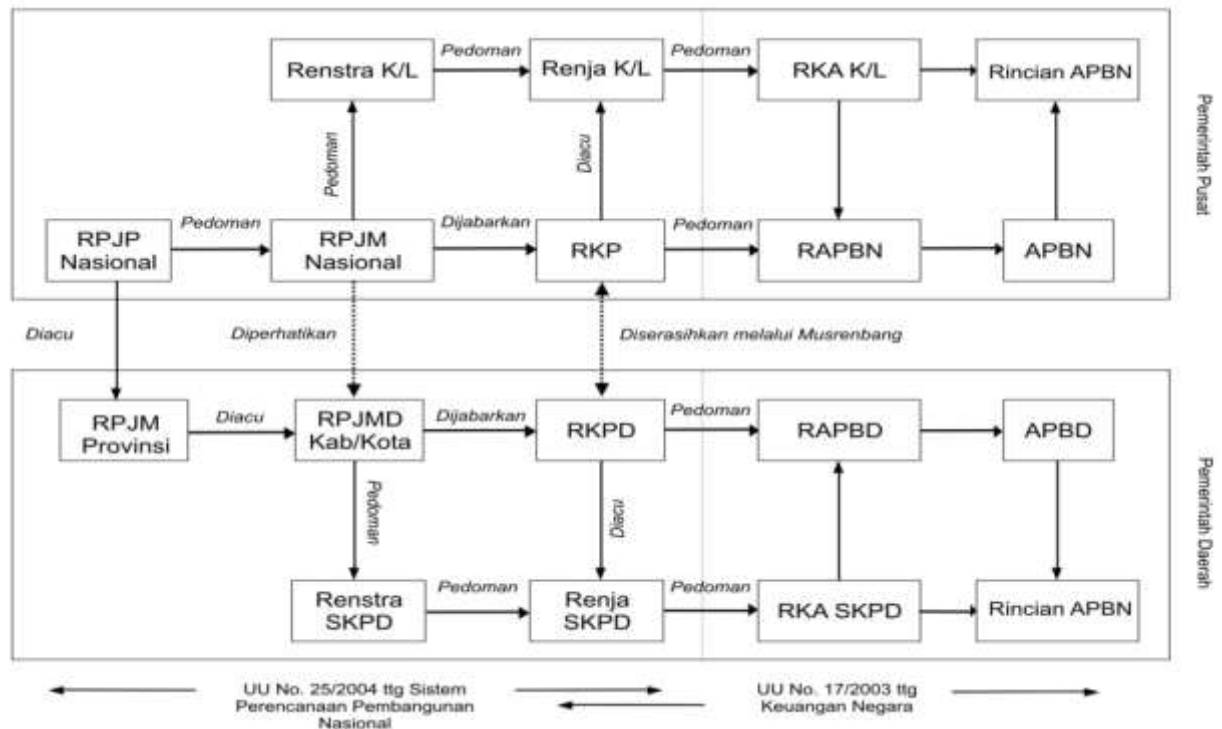
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diubah menjadi PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka RKPD Kota Surabaya akan dijadikan landasan bagi penyusunan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2024, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimana Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD).

Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap pentingnya upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup khususnya perempuan dan anak masyarakat Kota Surabaya. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih transparan dengan menginformasikan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menyusun rencana strategis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan.

1.2.1 Kelembagaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Dinas;
2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak;
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6222);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 17. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034;
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;

33. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97);

34. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/275/436.1.2/2021 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi maupun urusan wajib dan pilihan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
- 4.3. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Kajian (review) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan Tahun 2022 mencapai 93,04%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN. Target Tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN. Target Tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Target Tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 sebesar 93,56%. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 93,56%.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi. Target tahun 2022 sebanyak 23 rekening. Realisasi tahun 2022 sebanyak 23 rekening. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100,00%.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat

Daerah. Target Tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 sebesar 63,96%. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 63,96%.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi. Target Tahun 2022 yaitu 20 rekening. Realisasi tahun 2022 sebanyak 20 rekening. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator kinerja program yang pertama, Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud dengan capaian tahun 2022 sebesar 102,94%. Yang kedua, Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah. Target Tahun 2022 yaitu 3 dokumen. Realisasi tahun 2022 sebesar 3 dokumen. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indikator kinerja Jumlah perangkat daerah yang responsif gender. Target Tahun 2022 yaitu 58 lembaga. Realisasi tahun 2022 sebanyak 58 lembaga. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Target Tahun 2022 yaitu 600 orang. Realisasi tahun 2022 sebesar 600 orang. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan

peningkatan partisipasi perempuan. Target Tahun 2022 yaitu 4 kali. Realisasi tahun 2022 sebanyak 4 kali. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Target Tahun 2022 yaitu 21 kegiatan. Realisasi tahun 2022 sebesar 20 kegiatan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 95,24%.

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Target Tahun 2022 yaitu 1132 orang. Realisasi tahun 2022 sebanyak 1132 orang. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

- 3. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja program yang pertama, Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100,03%. Yang kedua, Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

- a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan. Target Tahun 2022 yaitu 10 kecamatan. Realisasi tahun 2022 sebesar 10 kecamatan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

- 1) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan. Target Tahun 2022 yaitu 100 orang. Realisasi tahun 2022 sebanyak 133 orang. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 133%.

- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Target Tahun 2022 yaitu 31 kasus. Realisasi tahun 2022 sebesar 38 kasus. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 122,58%.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti. Target Tahun 2022 yaitu 31 kasus. Realisasi tahun 2022 sebanyak 38 kasus. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 122,58%.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan. Target Tahun 2022 yaitu 31 kasus. Realisasi tahun 2022 sebanyak 38 kasus. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 122,58%.
- 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator kinerja Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai dengan realisasi tahun 2022 sebesar 154,07%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Target Tahun 2022 yaitu 12 laporan. Realisasi tahun 2022 sebesar 12 laporan. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan. Target Tahun 2022 yaitu 2 lembaga. Realisasi tahun 2022 sebanyak 2 lembaga. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.
- 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak

dengan capaian tahun 2022 sebesar 100%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

- a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak. Target Tahun 2022 yaitu 58 PD. Realisasi tahun 2022 sebesar 58 PD. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah. Target Tahun 2022 yaitu 2 kali. Realisasi tahun 2022 sebanyak 2 kali. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
6. Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator kinerja Persentase Kelurahan Layak Anak dengan capaian tahun 2022 sebesar 130,14%. Capaian Program tersebut dicapaimelalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak. Target Tahun 2022 yaitu 1 kegiatan. Realisasi tahun 2022 sebesar 1 kegiatan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - 1) Sub Kegaitan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan. Target Tahun 2022 yaitu 42 kelurahan. Realisasi tahun 2022 sebanyak 42 kelurahan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak. Target Tahun 2022 yaitu 3 kegiatan. Realisasi tahun 2022 sebesar 3 kegiatan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Shelter

yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan. Target Tahun 2022 yaitu 2 lembaga. Realisasi tahun 2022 sebanyak 2 lembaga. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

2) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak. Target Tahun 2022 yaitu 431 lembaga. Realisasi tahun 2022 sebanyak 447 lembaga. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 103,71%.

7. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja program yang pertama, Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam dengan capaian tahun 2022 sebesar 100%. Yang kedua, Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak dengan capaian tahun 2022 sebesar 100,03%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

a. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yang pertama, Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan, target Tahun 2022 yaitu 150 kasus, realisasi tahun 2022 sebanyak 154 kasus, persentase realiasi tahun 2022 yaitu 102,67%. Yang kedua, dengan indikator kinerja jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak, target Tahun 2022 yaitu 10 lembaga, realisasi tahun 2022 sebanyak 10 lembaga, persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah pengaduan yang diterima. Target Tahun 2022 yaitu 150 kasus. Realisasi tahun 2022 sebanyak 154 kasus. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 102,67%.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan

Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Target Tahun 2022 yaitu 150 kasus. Realisasi tahun 2022 sebanyak 154 kasus. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 102,67%.

8. Program Pengendalian penduduk dengan indikator kinerja Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan dengan capaian tahun 2022 sebesar 81,11%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan indikator kinerja Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK. Target Tahun 2022 yaitu 70 sekolah. Realisasi tahun 2022 sebesar 54 sekolah. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 77,14%.

- 1) Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal dengan indikator kinerja Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan. Target Tahun 2022 yaitu 140 orang. Realisasi tahun 2022 sebanyak 133 orang. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 95%.

- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan. Target Tahun 2022 yaitu 58 Perangkat Daerah. Realisasi tahun 2022 sebesar 58 Perangkat Daerah. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya. Target Tahun 2022 yaitu 1 dokumen. Realisasi tahun 2022 sebanyak 1 dokumen. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

- 2) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan indikator kinerja Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan. Target Tahun 2022 yaitu 1 dokumen. Realisasi tahun

2022 sebanyak 1 dokumen. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana yang memiliki 2 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:

- Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi. Target tahun 2022 adalah 82%, realisasi tahun 2022 sebesar 70,14%. Persentase capaian realisasi tahun 2022 yaitu 113,92%.
- Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi. Target tahun 2022 (lower is better) adalah 18,55%, realisasi tahun 2022 sebesar 21,64%. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 84,68%. Capaian program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB. Target Tahun 2022 yaitu 4 laporan. Realisasi tahun 2022 sebesar 4 laporan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

1) Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan indikator kinerja Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina. Target Tahun 2022 yaitu 31 kecamatan. Realisasi tahun 2022 sebanyak 31 kecamatan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan indikator kinerja Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina. Target Tahun 2022 yaitu 31 kecamatan. Realisasi tahun 2022 sebanyak 31 kecamatan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%. Sub kegiatan ini merupakan penyesuaian nomenklatur dari sub kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB.

- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan indikator kinerja Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP. Target Tahun 2022 yaitu 12 kali. Realisasi tahun 2022 sebesar 12 kali. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

1) Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga

Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dengan indikator kinerja Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan. Target Tahun 2022 yaitu 12 kali. Realisasi tahun 2022 sebanyak 12 kali. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

2) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan indikator kinerja Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Target Tahun 2022 yaitu 1566 orang. Realisasi tahun 2022 sebanyak 1566 orang. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR). Target Tahun 2022 yaitu 303.734 orang. Realisasi tahun 2022 sebesar 303.968 orang. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100,08%.

1) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan indikator kinerja Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus. Target Tahun 2022 yaitu 301.784 orang. Realisasi tahun 2022 sebanyak 303.968 orang. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100,72%.

2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan indikator kinerja Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK. Target Tahun 2022 yaitu 1950 orang. Realisasi tahun 2022 sebanyak 2184 orang. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 112%.

3) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK. Target Tahun 2022 yaitu 37 unit. Realisasi tahun 2022 sebanyak 37 unit. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang memiliki 4 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:

- Persentase balita yang mengikuti PAUD. Target tahun 2022 adalah 41,53%, realisasi tahun 2022 sebesar 124,88%. Persentase capaian realisasi tahun 2022 yaitu 99,97%.
- Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial. Target tahun 2022 adalah 39,24%, realisasi tahun 2022 sebesar 77,12%. Persentase capaian realisasi tahun 2022 yaitu 296,43%.
- Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya. Target tahun 2022 adalah 40%, realisasi tahun 2022 sebesar 0%. Persentase capaian realisasi tahun 2022 yaitu 107,14%.
- Median usia kawin pertama perempuan. Target tahun 2022 adalah 20 tahun, realisasi tahun 2022 sebesar 0 tahun. Persentase capaian realisasi tahun 2022 yaitu 116,65%.

Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Balita. Target Tahun 2022 yaitu 1 laporan. Realisasi tahun 2022 sebesar 1 laporan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Remaja. Target Tahun 2022 yaitu 1 laporan. Realisasi tahun 2022 sebesar 1 laporan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia. Target Tahun 2022 yaitu 1 laporan. Realisasi tahun 2022 sebesar 1 laporan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Target Tahun 2022 yaitu 1 laporan. Realisasi tahun 2022 sebesar 1 laporan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

- 1) Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) dengan indikator kinerja Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Target Tahun 2022 yaitu 160 keluarga. Realisasi tahun 2022 sebanyak 160 keluarga. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
- 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator kinerja pertama Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK), target Tahun 2022 yaitu 28 paket, realisasi 28 paket, dan persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%. Indikator kinerja kedua Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK), target Tahun 2022 yaitu 16 paket, realisasi 16 paket, dan persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
- 3) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator kinerja pertama Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, target Tahun 2022 yaitu 344 keluarga, realisasi 344 keluarga, dan persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%. Indikator kinerja kedua Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, target Tahun 2022 yaitu 54 keluarga, realisasi 54 keluarga, dan persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%. Indikator kinerja ketiga Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, target Tahun 2022 yaitu 113 keluarga, realisasi 113 keluarga, dan persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.

- 4) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator kinerja Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK). Target Tahun 2022 yaitu 31 kecamatan. Realisasi tahun 2022 sebanyak 31 kecamatan. Persentase realiasi tahun 2022 yaitu 100%.
- 5) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator kinerja Jumlah keluarga miskin sebagai Akseptor KB yang diintervensi. Target Tahun 2022 yaitu 14 keluarga. Realisasi tahun 2022 sebanyak 14 keluarga. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Surabaya**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	N/A	100%	930375%	93.04 %	100%		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	100%	100%	100%	100.00 %	N/A		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						24 Orang/bulan		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta	N/A	100%	100%	93.56 %	93.56 %	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor								
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi	N/A	N/A	23 Rekening	23 Rekening	100.00 %	N/A		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						17 Paket		
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	N/A	N/A	100%	63.96 %	63.96 %	100%		
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi	N/A	N/A	20 Rekening	20 Rekening	100.00 %	N/A		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						16 Laporan		
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	N/A	100%	1029412%	102.94 %	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	N/A	N/A	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %	3 Dokumen		
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG									
		Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	N/A	N/A	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00 %	N/A		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota						58 Perangkat Daerah		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	N/A	N/A	600 Orang	600 Orang	100.00 %	600 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
		Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	N/A	N/A	4 Kali	4 Kali	100.00 %	N/A		
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						31 Organisasi		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	21 Kegiatan	20 Kegiatan	95.24 %	12 Kegiatan		
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
		jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	N/A	N/A	1132 Orang	1132 Orang	100.00 %	N/A		
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						740 Orang		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	64.51%	N/A	32.25%	322581%	100.03 %	48.38%		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	N/A	N/A	10 kecamatan	10 kecamatan	100.00 %	15 kecamatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	N/A	N/A	100 orang	133 orang	133.00 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	N/A	N/A	31 kasus	38 kasus	122.58 %	20 kasus		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	31 kasus	38 kasus	122.58 %	N/A		
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang						20 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Mendapatkan Layanan Pengaduan								
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	N/A	N/A	31 kasus	38 kasus	122.58 %	N/A		
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	246	N/A	209	322	154.07 %	245		
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	100.00 %	12 laporan		
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	N/A	N/A	2 lembaga	2 lembaga	100.00 %	N/A		
		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga						3 Layanan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	N/A	N/A	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00 %	58 Lembaga		
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	N/A	N/A	2 Kali	2 Kali	100.00 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia						1 Dokumen		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
		Persentase Kelurahan Layak Anak	79.87%	N/A	47.4%	616883%	130.14 %	60.38%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %	1 kegiatan		
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	N/A	N/A	42 Kelurahan	42 Kelurahan	100.00 %	N/A		
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha						20 Organisasi		
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	N/A	N/A	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00 %	3 kegiatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	N/A	N/A	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00 %	N/A		
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						20 Orang		
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	N/A	N/A	431 Lembaga	447 Lembaga	103.71 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
		Kecepatan waktu pelayanan terhadap	N/A	N/A	100%	100%	100.00 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam								
		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	64.51%	N/A	32.25%	322581%	100.03 %	48.38%		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	N/A	150 kasus	154 kasus	102.67 %	150 kasus		
		Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	N/A	N/A	10 lembaga	10 lembaga	100.00 %	15 lembaga		
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah pengaduan yang diterima	N/A	N/A	150 kasus	154 kasus	102.67 %	N/A		
		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota						150 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	N/A	150 kasus	154 kasus	102.67 %	N/A		
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						150 Layanan		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	63.06%	N/A	30.15%	244541%	81.11 %	46.07%		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
		Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang	N/A	N/A	70 Sekolah	54 Sekolah	77.14 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK								
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal									
		Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	N/A	N/A	140 Orang	133 Orang	95.00 %	N/A		
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal						75 Satuan Pendidikan		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	N/A	N/A	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %	58 Perangkat Daerah		
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga									
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %	1 Dokumen		
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya						1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
		Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						1 Dokumen		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	13.18%	N/A	18.55%	213918%	84.68 %	14.25%		
		Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	84%	N/A	82%	934122%	113.92 %	83%		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	N/A	N/A	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %	N/A		
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	N/A	N/A	31 Kecamatan	31 Kecamatan	100.00 %	N/A		
		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB						31 Kampung		
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB									
		Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	N/A	N/A	31 Kecamatan	31 Kecamatan	100.00 %	N/A		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	N/A	N/A	12 Kali	12 Kali	100.00 %	12 Kali		
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									
		Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana	N/A	N/A	12 kali	12 kali	100.00 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kelurahan (PPKBBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK								
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						1 Laporan		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
		Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	N/A	N/A	1566 Orang	1566 Orang	100.00 %	N/A		
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						1566 Orang		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	N/A	N/A	303734 Orang	303968 Orang	100.08 %	416957 Orang		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
		Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	N/A	N/A	301784 Orang	303968 Orang	100.72 %	N/A		
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						1 Laporan		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
		Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	N/A	N/A	1950 orang	2184 orang	112.00 %	N/A		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						1950 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									
		Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	N/A	N/A	37 Unit	37 Unit	100.00 %	N/A		
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB						19 Unit		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
		Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.56%	N/A	41.53%	415166%	99.97 %	41.55%		
		Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	42%	N/A	40%	428571%	107.14 %	41%		
		Median usia kawin pertama perempuan	21tahun	N/A	20tahun	23.33tahun	116.65 %	20 tahun		
		Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	47.50%	N/A	39.24%	1163206%	296.43 %	43.37%		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
		Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Balita	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100.00 %	N/A		
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Remaja	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100.00 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100.00 %	N/A		
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100.00 %	N/A		
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)									
		Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	N/A	N/A	160 keluarga	160 keluarga	100.00 %	N/A		
		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)						2263 Kelompok		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk								
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
		Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	N/A	N/A	28 paket	28 paket	100.00 %	N/A		
		Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	N/A	N/A	16 paket	16 paket	100.00 %	N/A		
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						20 Unit		
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
		Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	344 keluarga	344 keluarga	100.00 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	54 keluarga	54 keluarga	100.00 %	N/A		
		Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	113 keluarga	113 keluarga	100.00 %	N/A		
		Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						625 Orang		
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
		Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	N/A	N/A	31 kecamatan	31 kecamatan	100.00 %	N/A		
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						6642 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
		Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	N/A	N/A	14 keluarga	14 keluarga	100.00 %	N/A		
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						1 Laporan		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tematik Penanggulangan Stunting, seluruh perangkat daerah melakukan pemetaan terhadap program kerja dengan skala prioritas sebagai upaya pencegahan penambahan balita stunting dan penanganannya di Kota Surabaya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagai Lembaga Teknis Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan dan monitoring di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. Selain itu juga memberikan pelayanan dengan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pencegahan penambahan balita stunting dari hulu ke hilir. Artinya intervensi diterima mulai dari remaja dalam bentuk sosialisasi dan edukasi, pada calon pengantin berupa pendampingan, pada ibu hamil, bayi, balita, dan terus berkelanjutan. Sehingga diharapkan pemerintah Kota Surabaya yang telah zero stunting dapat mempertahankan dengan tidak adanya penambahan angka balita stunting.

Dalam Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melibatkan stakeholder dan masyarakat, dalam menekan angka stunting melalui pendampingan keluarga dengan sasaran sasaran Calon Pengantin (Catin), Keluarga Berisiko dan Balita Stunting. Di bidang perlindungan perempuan dan anak bentuk layanan yang diberikan adalah koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak skala kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya berdasarkan tugas dan fungsinya bisa dilihat dari capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berikut capaian pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	100%				100%				Renstra 2021-2026
2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi	-	-	6 rekening				20 Rekening				Renstra 2021-2026
3	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	-	-	58 lembaga				58 lembaga				Renstra 2021-2026
4	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	-	-	4 kali				4 kali				Renstra 2021-2026
5	Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	-	-	20 kasus				38 kasus				Renstra 2021-2026
6	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	-	-	17 kasus				38 kasus				Renstra 2021-2026
7	Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	-	-	2 kali				2 kali				Renstra 2021-2026
8	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	-	-	431 lembaga				447 lembaga				Renstra 2021-2026
9	Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	-	-	20 kelurahan				42 kelurahan				Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Jumlah pengaduan yang diterima	-	-	150 kasus				154 kasus				Renstra 2021-2026
11	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	150 kasus				154 kasus				Renstra 2021-2026
12	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	-	-	1566 orang				1566 orang				Renstra 2021-2026
13	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	-	-	1950 orang				2184 orang				Renstra 2021-2026
14	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	-	-	19 unit				37 unit				Renstra 2021-2026
15	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	-	-	31 kecamatan				31 kecamatan				Renstra 2021-2026
16	Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	-	-	100 orang				133 orang				Renstra 2021-2026
17	Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	-	-	28 paket				28 paket				Renstra 2021-2026
18	Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	-	-	10 paket				16 paket				Renstra 2021-2026
19	Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	-	160 keluarga				160 keluarga				Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	-	-	2 lembaga				2 lembaga				Renstra 2021-2026
21	Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi	-	-	15 rekening				23 rekening				Renstra 2021-2026
22	Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	344 keluarga				344 keluarga				Renstra 2021-2026
23	Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	113 keluarga				113 keluarga				Renstra 2021-2026
24	Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	54 keluarga				54 keluarga				Renstra 2021-2026
25	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	-	-	31 kecamatan				31 kecamatan				Renstra 2021-2026
26	Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	-	-	14 keluarga				14 keluarga				Renstra 2021-2026
27	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	-	-	140 orang				133 orang				Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	-	-	1 dokumen				1 dokumen				Renstra 2021-2026
29	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK	-	-	12 kali				12 kali				Renstra 2021-2026
30	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	-	-	414961 orang				303968 orang				Renstra 2021-2026
31	Jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-	-	740 orang				1132 orang				Renstra 2021-2026
32	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	-	-	-	49 Kelompok	54 Kelompok	56 Kelompok	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	38 Unit	38 Unit	38 Unit	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
34	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	625 Orang	852 Orang	966 Orang	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
35	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	6642 Orang	6642 Orang	6642 Orang	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
36	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	-	-	-	75 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	85 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
38	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
39	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
40	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
41	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
43	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-	-	1566 Orang	1566 Orang	1566 Orang	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
44	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
45	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	-	1950 Orang	1950 Orang	1950 Orang	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
46	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	-	-	19 Unit	19 Unit	19 Unit	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
47	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	-	-	-	31 Kampung	31 Kampung	31 Kampung	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
49	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	5 Paket	5 Paket	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	6 Paket	6 Paket	6 Paket	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
51	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
52	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	31 Organisasi	31 Organisasi	31 Organisasi	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
53	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-	-	740 Orang	740 Orang	740 Orang	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
55	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
56	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
57	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	17 Layanan	17 Layanan	17 Layanan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
58	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
59	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	-	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-	-	-	20 Organisasi	20 Organisasi	20 Organisasi	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
61	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
62	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
63	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
64	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	150 Orang	150 Orang	150 Orang	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026
65	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan	-	-	-	150 Layanan	150 Layanan	150 Layanan	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											
66	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	P-Renstra 2021-2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
- b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan *trafficking* (perdagangan orang).
- c. Salah satu program untuk pencegahan kemiskinan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyesuaian keluarga. Upaya preventif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendampingan kelompok tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
- d. Masih adanya ketimpangan gender yang terjadi baik di pemerintahan maupun masyarakat dalam pemenuhan indikator 7 prasyarat pengarusutamaan gender (PUG).
- e. Meningkatkan kualitas keluarga melalui pencegahan balita stunting dengan target zero stunting Kota Surabaya.

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Renja tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan hampir tercapai 100%. Begitu pula pada Renja tahun 2022 capaian realisasi terhadap target mendekati angka 100% di semua kegiatan.

Sedangkan Capaian Renstra 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2022 hampir seluruh kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun sejak tahun 2020 banyak indikator kinerja dan target kegiatan yang berubah, mengikuti perubahan Misi Kepala Daerah Kota Surabaya.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Pada pelaksanaan Renja tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang berarti dan apabila terdapat hambatan bisa dengan cepat dicarikan solusi melalui koordinasi. Hal ini dapat dilakukan berkat dukungan dana yang sudah dianggarkan, serta dukungan sumber daya manusia yang menjalankan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Sedangkan untuk tahun 2022 terdapat perubahan birokrasi dan struktur organisasi mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 3 Tahun 2021 sehingga diperlukan penyesuaian pelaksanaan tugas.

Permasalahan dan Hambatan yang muncul bisa diidentifikasi melalui analisa kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:

1. Anggaran kegiatan
2. Pengarusutamaan program dan anggaran yang responsif gender
3. Sarana dan Prasarana perkantoran
4. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
5. Kewenangan untuk melaksanakan program Program Pengendalian Penduduk
6. Kewenangan untuk melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
7. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
8. Kewenangan untuk melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga
9. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
10. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Perempuan
11. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Khusus Anak
13. Kewenangan untuk melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. Dokumen Manajemen Risiko
15. Proses Bisnis Instansi dan SOP untuk pelaksanaan kegiatan

b. Kelemahan yang dimiliki antara lain:

1. Jumlah dan Kompetensi SDM
2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
3. Pemanfaatan data penjangkauan masyarakat
4. Tata letak ruang perkantoran yang kurang memadai

c. Permasalahan terkait capaian kinerja dalam rancangan teknokratik RPJMD 2021-2026 terdiri dari :

1. Belum optimalnya KIE terkait kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga bagi remaja;
2. Belum optimalnya capaian Kelurahan Ramah Anak;
3. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam Ipoleksosbud;
4. Belum optimalnya kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Keluarga Miskin (GAMIS), khususnya bagi keluarga akseptor;
5. Belum optimalnya penggunaan Metode KB Jangka Panjang;
6. Masih adanya permasalahan pada perempuan dan anak;
7. Belum optimalnya pemahaman pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berisiko dan balita stunting dalam upaya percepatan penurunan stunting.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Peluang yang dimiliki terdiri dari:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat;
3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya;
4. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar PD;
5. Terbitnya Surat Mendagri tentang kewajiban untuk membentuk UPTD PPA sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memperkuat kelembagaan perlindungan

perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTP2A);

6. Integrasi program yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TGB/SDGs) dalam pelaksanaan praktik keterbukaan pemerintah melalui penyelarasan Rencana Aksi Nasional terkait HAM, percepatan penurunan angka stunting dan pelayanan keluarga berencana;
7. Puncak bonus demografi di tahun 2020-2035 menjadi kesempatan emas dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya pada peningkatan kualitas anak dan perempuan dalam pemahaman kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga;
8. Kemudahan dan kecepatan akses informasi yang membawa dampak globalisasi terhadap kecenderungan perubahan nilai budaya, pola pikir, pola sikap dan pola perilaku manusia, terutama generasi muda.

b. Ancaman yang dimiliki terdiri dari:

1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya;
2. Pengaruh arus informasi yang diakses melalui media sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral terhadap tumbuh kembang anak dan timbulnya permasalahan sosial;
3. Dampak pandemi Covid 19 yang masih berjalan tahap pemulihan sehingga masih mempengaruhi kerentanan ekonomi dan emosional perempuan, ketidaksetaraan gender, potensi kehilangan orang tua sehingga berdampak pada pola asuh anak-anak;
4. Ancaman pernikahan dini pada penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam masa bonus demografi menghambat program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga populasi bertambah, melahirkan generasi stunting dan menjadi tidak produktif.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 1. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, hal ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan permasalahan perempuan dan anak antara lain trafficking.
 2. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di masyarakat sampai ke akar masalah.
 3. Belum adanya pendokumentasian intervensi ketuntasan kasus permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yang terintegrasi lintas OPD.
 4. Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas belum sepenuhnya optimal.
 5. Belum optimalnya anggaran responsif gender (ARG) pada APBD sebagai bukti intervensi responsif gender pada masyarakat.
 6. Masih adanya ketimpangan gender yang terlihat dari pemahaman konsep dan praktis dari pengarusutamaan (PUG) sendiri yang masih cenderung mendefinisikan PUG sebagai program-program yang terkait perempuan semata.
 7. Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui perwujudan Kota Layak Anak yang mendunia.
- **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
 1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
 2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmet need).
 3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
 4. Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja / beraktivitas di Kota Surabaya.
 5. Pencegahan balita pra stunting memerlukan intervensi yang terintegrasi dengan OPD lain sehingga tidak ada lagi balita stunting baru.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada sub kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menghasilkan analisa kebutuhan pada rancangan renja 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 11,184,675,931,- outputnya terdiri dari :

Target : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 orang/bulan

Kelompok Sasaran : ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bentuk Kegiatan : Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

Materi Kegiatan : Tersedianya anggaran pemenuhan gaji dan tunjangan ASN

Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan

Alasan Pemilihan Target : Pertimbangan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 2,272,803,053,- outputnya terdiri dari :

Target : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 paket

Kelompok Sasaran : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bentuk Kegiatan : Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

Materi Kegiatan : Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan

Alasan Pemilihan Target : Memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 540,828,046,- outputnya terdiri dari :

Target : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 laporan

Kelompok Sasaran : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bentuk Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Materi Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan

Alasan Pemilihan Target : Memenuhi ketersediaan barang dan jasa perangkat daerah agar tercapai efektivitas pekerjaan

4. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu anggaran Rp. 586,142,736,- outputnya terdiri dari :

Target	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 58 Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kota Surabaya, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya
Bentuk Kegiatan	: Capacity Building, pendampingan dan evaluasi PUG, Penyusunan Dokumen PERencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), presentasi profil Kecamatan Responsif Gender, Sosialisasi terkait Gender pada Masyarakat, Pelaksanaan Surabaya Gender Award
Materi Kegiatan	: Dilaksanakan dengan melakukan capacity building serta dilakukan evaluasi secara langsung sehingga diharapkan Pengarusutamaan Gender dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
Frekuensi Pelaksanaan	: Berdasarkan pertimbangan teknis pendampingan terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan
Alasan Pemilihan Target	: Membangun Sinergi dengan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan perihal Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam upaya pengarusutamaan gender di Kota Surabaya

5. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan pagu anggaran Rp. 416,538,453,- outputnya terdiri dari :

Target	: Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Organisasi
Kelompok Sasaran	: Gabungan Organisasi Perempuan (GOW)
Bentuk Kegiatan	: Sosialisasi terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi
Materi Kegiatan	: Peningkatan Peran Organisasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Frekuensi Pelaksanaan	: 1 Tahun dilaksanakan sebanyak 5 kali.
Alasan Pemilihan Target	: Gabungan Organisasi Wanita merupakan mitra Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan perempuan serta pendorong program-program pemerintah kota yang dapat meningkatkan kemandirian serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang ekonom, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.

6. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 581,469,300,- outputnya terdiri dari :

Target	: Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 740 orang
Kelompok Sasaran	: Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Bentuk Kegiatan	: Peringatan Hari Kartini, Capacity Building Anggota DWP, Peringatan Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita Kota Surabaya, Pelatihan Keterampilan Dharma Wanita Persatuan, Seminar Pengaruh Pola Asuh Ibu Bekerja terhadap Tumbuh Kembang Anak Balita, Pra Remaja dan Remaja, Khitanan Massal Bagi Peserta Didik dan Gamis, Workshop: Bekal Pengetahuan bagi Remaja Putri dalam Menghadapi Masa Pubertas, dan Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Menekan Tingkat Kenakalan Remaja Usia Sekolah, Pelatihan Padat Karya Dalam Rangka Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Ada di Wilayah Kecamatan Se-Surabaya, Pelatihan Bagi Para Pelaku Usaha Makanan Untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Rasa Serta Merubah Mindset Bisnis (Sentra Wisata Kuliner), Inkubasi Penjahit Surabaya Untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Kualitas Penjahit, Bursa Kerja / Job Fair Asik (HUT Dharma Wanita Persatuan), Lomba Hantaran Balita Stunting (HUT Dharma Wanita Persatuan)
Materi Kegiatan	: Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan dalam upaya Pemberdayaan serta Penyediaan Layanan bagi Perempuan di tingkat Kota
Frekuensi Pelaksanaan	: 1 Tahun dilaksanakan sebanyak 12 kali kegiatan
Alasan Pemilihan Target	: Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang merupakan Organisasi Kewanitaan beranggotakan istri PNS sebagai mitra kerja Pemerintah dalam mendorong program-program yang dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan

7. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal dengan pagu anggaran Rp. 309,937,084,- outputnya terdiri dari :

Target	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan
--------	---

- Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal 80 Satuan Pendidikan
- Kelompok Sasaran : Guru dan Siswa
- Bentuk Kegiatan : Pelatihan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) bagi Guru SLTP/MTS dan pembentukan SSK untuk SLTP/MTS
- Materi Kegiatan : Pembekalan Guru SMP dalam pengintegrasian Pendidikan Kependudukan
- Frekuensi Pelaksanaan : 4 kali dalam setahun
- Alasan Pemilihan : Generasi Muda bagian dalam program mewujudkan Target Bangsa Kencana melalui guru / pendidik
8. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki tiga sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan** : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- Target : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 dokumen
- Pagu Anggaran : Rp. 149,842,769,-
- Kelompok Sasaran : Bappeko, Disnaker, Dispendik, Dinkes, Diskominfo, 31 Kecamatan
- Bentuk Kegiatan : Pembuatan Grand Design Pengendalian Penduduk 1 Pilar di Kota Surabaya beserta Profil Kependudukan dan Sosialisasi Profil Kependudukan kepada stakeholder
- Materi Kegiatan : Profil Kependudukan
- Frekuensi Pelaksanaan : Satu kali dalam setahun
- Alasan Pemilihan : Pertimbangan Dokumen Setiap Tahun Harus Ada Target Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)
- Sub Kegiatan** : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- Target : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 laporan
- Pagu Anggaran : Rp. 232,800,000,-
- Kelompok Sasaran : Petugas Lini Lapangan
- Bentuk Kegiatan : Pemutakhiran data
- Materi Kegiatan : Sosialisasi terkait pengisian aplikasi Rumah Dataku, Pendataan Keluarga, dan Kampung KB
- Frekuensi Pelaksanaan : 1 kali dalam satu tahun
- Alasan Pemilihan : Terkumpulnya data Poktan yang dapat dijadikan data dasar program Bangsa Kencana
- Sub Kegiatan** : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- Target : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 laporan
- Pagu Anggaran : Rp. 64,200,000,-
- Kelompok Sasaran : PKB dan Fasilitas Kesehatan
- Bentuk Kegiatan : Pencatatan dan pelaporan pada aplikasi New Siga
- Materi Kegiatan : Pengisian pelayanan KB dan pengendalian lapangan pada aplikasi New Siga
- Frekuensi Pelaksanaan : 3 kali dalam satu tahun

- Alasan Pemilihan Target : Peningkatan pencatatan dan pelaporan pada aplikasi New Siga
9. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal memiliki empat sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan** : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Target** : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan
- Pagu Anggaran** : Rp. 403,000,000,-
- Kelompok Sasaran** : 31 Kecamatan
- Bentuk Kegiatan** : Rapat koordinasi terkait pencegahan hingga penanganan stunting yang dikemas dalam bentuk mini loka karya. Minilok merupakan kegiatan pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat Kecamatan dan membina (coach) bagi Tim Pendamping.
- Materi Kegiatan** : 3 (tiga) STANDAR: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih, (2) Tersedia Alat Ukur/Aplikasi Pengukuran untuk sasaran Stunting dan (3) Tersedia dan terlaksananya Prosedural Operasional Percepatan Penurunan Stunting serta terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata, (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.
- Frekuensi Pelaksanaan** : 10 kali
- Alasan Pemilihan Target** : Sesuai dengan petunjuk teknis BOKB yang tertera dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 13 Tahun 2023 tahun n-1.
- Sub Kegiatan** : Pengendalian Program KKBPK
- Target** : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan
- Pagu Anggaran** : Rp. 80,000,000,-
- Kelompok Sasaran** : Kelurahan yang teridentifikasi dengan status stunting
- Bentuk Kegiatan** : Audit stunting
- Materi Kegiatan** : 1) Pelaksanaan Audit dan Manajemen AKS; 2) Pelaksanaan Diseminasi Hasil Kajian dan Rencana Tindak lanjut; dan 3) Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pasca Diseminasi.
- Frekuensi Pelaksanaan** : 1 kali dalam 1 tahun

Alasan Pemilihan Target	: Berdasarkan hasil survei Tim Pendamping Keluarga
Sub Kegiatan	: Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Target	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp. 150,000,000,-
Kelompok Sasaran	: Remaja, calon pengantin, keluarga yang baru menikah, keluarga yang memiliki balita, dan keluarga yang memiliki remaja
Bentuk Kegiatan	: Penyampaian pesan Program Bangga Kencana dan penurunan stunting melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
Materi Kegiatan	: Program Bangga Kencana dan pencegahan/penurunan stunting
Frekuensi Pelaksanaan	: 1 kali dalam satu tahun
Alasan Pemilihan Target	: Sebagai upaya tersampainya program bangga kencana dengan baik dan pencegahan/penurunan kasus stunting
Sub Kegiatan	: Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Target	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 31 Organisasi
Pagu Anggaran	: Rp. 120,000,000,-
Kelompok Sasaran	: 31 TPPS di Kecamatan
Bentuk Kegiatan	: Rapat koordinasi terkait percepatan penurunan stunting
Materi Kegiatan	: Balita stunting, ibu hamil resiko tinggi, calon pengantin resiko tinggi, dan ibu nifas resiko tinggi
Frekuensi Pelaksanaan	: 4 kali dalam satu tahun
Alasan Pemilihan Target	: Sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting dan pencegahan terjadinya kasus stunting baru

10. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) memiliki tiga sub kegiatan yaitu :

Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Target	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 laporan

Pagu Anggaran	: Rp. 974,063,000,-
Kelompok Sasaran	: Kader, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
Bentuk Kegiatan	: Pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK
Materi Kegiatan	: Pembinaan terhadap pembantu pembina keluarga berencana kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di kecamatan masing-masing dengan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
Frekuensi Pelaksanaan	: 2 hari x12 kali
Alasan Pemilihan Target	: Setiap kelurahan memiliki kader KB untuk melakukan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB dan setiap kelurahan memiliki pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW untuk mendukung program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk.
Sub Kegiatan	: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Target	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1566 Orang
Pagu Anggaran	: Rp. 308,000,000,-
Kelompok Sasaran	: Kader IMP
Bentuk Kegiatan	: Melakukan Pembinaan kepada Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan masing-masing.
Materi Kegiatan	: Pembinaan Peduli Keluarga Berencana adalah Pembinaan Kegiatan Institusi Masyarakat Perkotaan Pembinaan dalam Capacity Building dan evaluasi program KB di kecamatan masing-masing dengan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
Frekuensi Pelaksanaan	: 12 kali dalam Satu Tahun
Alasan Pemilihan Target	: Setiap kelurahan memiliki kader KB untuk melakukan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB dan setiap kelurahan memiliki pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW untuk mendukung program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk.
Sub Kegiatan	: Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
Target	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 31 Organisasi
Pagu Anggaran	: Rp. 48,000,000,-
Kelompok Sasaran	: Tenaga Lini Lapangan

Bentuk Kegiatan	: Pertemuan pembinaan Tenaga Lini Lapangan
Materi Kegiatan	: Peran tenaga lini lapangan dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Frekuensi Pelaksanaan	: 2 kali dalam satu tahun
Alasan Pemilihan Target	: Pentingnya Peran tenaga lini lapangan dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

11. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota memiliki empat sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan	: Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Target	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp. 1,864,930,240,-
Kelompok Sasaran	: Masyarakat, calon akseptor KB dan Pasangan Usia Subur
Bentuk Kegiatan	: Memberikan Pelayanan KB MOW dan MOP pada Pasangan Usia Subur warga Kota Surabaya yang dilaksanakan dengan melakukan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan maupun melalui Bkati Sosial
Materi Kegiatan	: Pelayanan KB MOW dan MOP
Frekuensi Pelaksanaan	: 12 bulan
Alasan Pemilihan Target	: Sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dalam rangka mengendalikan kualitas penduduk melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian kelahiran dari Pasangan Usia Subur.
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Target	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1950 orang
Pagu Anggaran	: Rp. 6,426,473,000,-
Kelompok Sasaran	: Masyarakat, calon akseptor KB dan Pasangan Usia Subur
Bentuk Kegiatan	: Memberikan Pelayanan KB IUD, Implan, MOW dan MOP pada Pasangan Usia Subur yang dilaksanakan dengan melakukan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan maupun melalui Bkati Sosial (DAK)
Materi Kegiatan	: Pelayanan KB IUD, Implan, MOW dan MOP
Frekuensi Pelaksanaan	: 12 bulan

Alasan Pemilihan Target	: Sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dalam rangka mengendalikan kualitas penduduk melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian kelahiran dari Pasangan Usia Subur (DAK)
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Target	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 19 unit
Pagu Anggaran	: Rp. 832,955,000,-
Kelompok Sasaran	: Masyarakat
Bentuk Kegiatan	: Lelang (tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog pada DAK FISIK berupa pengadaan Sepeda Motor untuk antar/jemput akseptor KB (DAK)
Materi Kegiatan	: Lelang(Tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog.
Frekuensi Pelaksanaan	: 1 kali
Alasan Pemilihan Target	: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas; • Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; • Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah; • Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia; • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu;
Sub Kegiatan	: Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Target	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan
Pagu Anggaran	: Rp. 54,300,000,-
Kelompok Sasaran	: Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Bentuk Kegiatan	: Pembinaan, monitoring, dan evaluasi
Materi Kegiatan	: Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB
Frekuensi Pelaksanaan	: 4 kali dalam 1 tahun
Alasan Pemilihan Target	: Meningkatkan hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan KB

12. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB memiliki dua sub kegiatan yaitu :

Sub Kegiatan	: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
---------------------	--

Target	: Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 31 Kampung
Pagu Anggaran	: Rp. 480,500,000,-
Kelompok Sasaran	: Kampung KB di 31 Kecamatan
Bentuk Kegiatan	: DAK NON FISIK berupa Pembinaan Kampung KB di Kota Surabaya (musyawarah kelurahan, pertemuan pokja, lokakarya setiap bulan (DAK).
Materi Kegiatan	: Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas, pembinaan dan penyuluhan Kampung KB di tingkat desa/kelurahan; > Pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD); > Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) dari gudang PD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan Keluarga berencana yang teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; > Penggerakan dan Pelayanan KB IUD, Implan, MOW dan MOP pada Fasilitas Kesehatan dan PMB yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh Kecamatan yang menjadi sasaran;
Frekuensi Pelaksanaan	: 12 bulan
Alasan Pemilihan Target	: Kegiatan dimaksud ditujukan untuk mendampingi secara intensif wilayah RW yang kondisinya jumlah penduduk, kegiatan ketahanan keluarga, kelompok kegiatan, kebersihan dan lain-lain dianggap masih kurang untuk menjadi lebih baik. Serta untuk pencapaian target/sasaran program Pro PN prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Sub Kegiatan	: Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
Target	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp. 9,000,000,-
Kelompok Sasaran	: OPD dan lintas sektor terkait
Bentuk Kegiatan	: Pertemuan koordinasi OPD dan lintas sektor terkait di kampung KB
Materi Kegiatan	: Integrasi dan konvergensi lintas sektor di Kampung KB
Frekuensi Pelaksanaan	: 1 kali dalam satu tahun
Alasan Pemilihan Target	: Koordinasi terkait Integrasi dan konvergensi di Kampung KB

13. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 188,400,000,- outputnya terdiri dari :

Target	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 20 orang
Kelompok Sasaran	: Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Trafficking Warga Surabaya
Bentuk Kegiatan	: 1. Penerimaan Pengaduan yang dilanjutkan dengan penanganan awal 2. Penerimaan bersumber dari Warga, Command Center, Hotline UPTD PPA, Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, Aparat Penegak Hukum, PD, Kelurahan, Kecamatan, maupun Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Pendampingan psikologis awal bagi klien
Materi Kegiatan	: Pengaduan dan Penanganan Awal melalui telepon / chat menyesuaikan kondisi klien
Frekuensi Pelaksanaan	: 12 bulan
Alasan Pemilihan Target	: Jumlah kasus pengaduan dalam 12 Bulan

14. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota satu sub kegiatan yaitu Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kotadengan pagu anggaran Rp. 409,142,389,- outputnya terdiri dari :

Target	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 dokumen
Kelompok Sasaran	: Relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) Yang ada di Kecamatan
Bentuk Kegiatan	: Sosialisasi, Advokasi, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan Relawan dalam menangani permasalahan Perempuan dan Anak
Materi Kegiatan	: Dilaksanakan menyesuaikan isu permasalahan perempuan dan anak yang terjadi pada tahun berjalan
Frekuensi Pelaksanaan	: 4 kali dalam setahun
Alasan Pemilihan Target	: Relawan PKBM tersebar di masing masing Kecamatan di Kota Surabaya sebagai mitra kerja ditingkat Kecamatan yang membantu Pemerintah Kota Surabaya

15. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memiliki lima sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan	: Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
Target	: Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan

	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk 54 kelompok
Pagu Anggaran	: Rp. 1,074,157,885,-
Kelompok Sasaran	: Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki balita, remaja dan lansia
Bentuk Kegiatan	: Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berupa sosialisasi
Materi Kegiatan	: Pembentukan dan pendampingan terhadap kader/orangtua yang memiliki Balita/Remaja/Lansia
Frekuensi	: 1 kali dalam setahun
Pelaksanaan	
Alasan Pemilihan Target	: 31 Kecamatan terdapat Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB/BKR/BKL).
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 38 unit
Pagu Anggaran	: Rp. 360,000,000,-
Kelompok Sasaran	: Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki balita yang berada di wilayah lokus stunting
Bentuk Kegiatan	: DAK FISIK berupa pengadaan BKB KIT Stunting
Materi Kegiatan	: Dokumen dan Barang Pelaksanaan Pengadaan Sarana Kelompok
Frekuensi	: 1 kali dalam setahun
Pelaksanaan	
Alasan Pemilihan Target	: Lokus Stunting
Sub Kegiatan	: Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target	: Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 852 Orang
Pagu Anggaran	: Rp. 915,355,280,-
Kelompok Sasaran	: - Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki balita - Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki remaja - Kader, orang tua dan/atau pihak-pihak yang memiliki lansia
Bentuk Kegiatan	: Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia
Materi Kegiatan	: Pembinaan terhadap kader dan keluarga yang memiliki balita, remaja, dan lansia

Frekuensi	:	1 kali BKB dalam setahun
Pelaksanaan	:	1 kali BKR dalam setahun
	:	1 kali BKL dalam setahun
Alasan Pemilihan Target	:	Untuk mendukung rencana tindak lanjut dari kegiatan pembentukan kelompok tribina
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target	:	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 6642 Orang
Pagu Anggaran	:	Rp. 13,948,200,000,-
Kelompok Sasaran	:	Tim Pendamping Keluarga di 31 Kecamatan
Bentuk Kegiatan	:	Pelaksanaan Operasional Penurunan Stunting, berupa : 1. Paket Data/Pulsa Untuk Kegiatan Surveillance Stunting 2. Biaya Operasional Tim Pendampingan Keluarga
Materi Kegiatan	:	Pendampingan dan sosialisasi percepatan penurunan stunting
Frekuensi	:	12 bulan
Pelaksanaan	:	
Alasan Pemilihan Target	:	Jumlah Tim Pendamping Keluarga di Kota Surabaya
Sub Kegiatan	:	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target	:	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan
Pagu Anggaran	:	Rp. 936,140,461,-
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Marginal (Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai Akseptor KB) dan pemuda Kota Surabaya dalam gender
Bentuk Kegiatan	:	Sosialisasi dan pendampingan peserta promosi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Materi Kegiatan	:	- Assessment calon peserta (verifikasi data dan penelusuran minat) - Pembekalan softskill dan kewirausahaan (motivasi) - Pendampingan
Frekuensi	:	Pelaksanaan pendampingan bagi binaan pemberdayaan ekonomi keluarga selama 12 bulan
Pelaksanaan	:	
Alasan Pemilihan Target	:	- UPPKA : Jumlah Akseptor KB yang termasuk Keluarga Miskin - GENRE : 153 Kelurahan

16. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam

Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 1,239,560,164,- outputnya terdiri dari :

- Target : Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Layanan
- Kelompok Sasaran : Puspaga Umum dan Puspaga ABK
- Bentuk Kegiatan : 1. Konseling/Konsultasi permasalahan Keluarga da ABK
2. Bimbingan Masyarakat melalui kegiatan Kelas Calon Pengantin, Kelas Parenting
3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Puspaga Balai RW
4. Promosi Sosialisasi Edukasi melalui Talkshow bersama Praktisi Keluarga, Instagram Live / Webinar bersama Konselor Puspaga, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Bersama Tenaga Pendidik & Puspaga, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Masyarakat Rentan & Puspaga, Kelas Inspirasi Bersama Walikota Surabaya & Puspaga
5. Publikasi Dokumentasi terkait Keluarga melalui media cetak dan elektrtonik
- Materi Kegiatan : 1. Konseling seputar Orang Tua, Anak, Wali, Calon Orang Tua, Orang yang bertanggungjawab terhadap anak
2. Bimbingan Masyarakat untuk Kelas Calon Pengantin meliputi Kondisi Psikologis, Keagamaan, Literasi Keuangan, Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sakinah
3. Pemberian Dukungan Psikologis Awal, Hak Hak Anak, dan Pola Asuh Orang tua dan Keluarga, Perkembangan Anak
4. Promosi Sosialisasi Edukasi Parenting Umum dan Parenting ABK menyesuaikan trend kondisi pada tahun berjalan
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
- Alasan Pemilihan Target : Untuk Mendukung pelayanan konseling dan konsultasi kepada masyarakat diperlukan Puspaga Umum & Puspaga ABK dan Puspaga Balai RW yang juga berfungsi sebagai layanan preventif dan promotif

17. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 270,982,327,- outputnya terdiri dari :

- Target : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen
- Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya, dan seluruh Kecamatan di Kota Surabaya
- Bentuk Kegiatan : Penyusunan Dokumen Buku Profil Gender Kota Surabaya, Sosialisasi terkait Sistem Informasi Gender

Materi Kegiatan	: Arek Suroboyo (SIGAS), Penyusunan Data Gender Terpilah pada Seluruh Perangkat Daerah Kota Surabaya
Frekuensi Pelaksanaan	: Pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan /program /kegiatan pembangunan yang responsif gender di Kota Surabaya serta Dokumen Gender di Kota Surabaya
Alasan Pemilihan Target	: Berdasarkan pertimbangan teknis pendampingan terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan
	: Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di Kota Surabaya.

18. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 817,567,210,- outputnya terdiri dari :

Target	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 20 Organisasi
Kelompok Sasaran	: Seluruh Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT di Kota Surabaya
Bentuk Kegiatan	: Fasilitasi dan pembinaan Kampung di seluruh Kelurahan terkait Kampung Ramah Perempuan dan Anak
Materi Kegiatan	: Pembinaan serta pembentukan Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak bagi RT RW di Kelurahan seluruh Kota Surabaya
Frekuensi Pelaksanaan	: 16 kali dalam setahun
Alasan Pemilihan Target	: Setiap kelurahan di Kota Surabaya terdapat kampung yang terdiri dari RT dan RW yang perlu dibina untuk menjadi Kampung Ramah Perempuan dan Anak

19. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki dua sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan	: Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Target	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10 orang
Pagu Anggaran	: Rp. 1,430,671,463,-
Kelompok Sasaran	: Shelter ABH: untuk anak-anak yang merupakan warga Kota Surabaya dan berhadapan dengan hukum

	Shelter perempuan: Untuk anak-anak perempuan yang merupakan warga Kota Surabaya dan merupakan korban kekerasan
Bentuk Kegiatan	: Pemeliharaan dan penyelenggaraan operasional untuk mendukung penanganan permasalahan perempuan dan anak
Materi Kegiatan	: Pembinaan Mental Spiritual, Pengawasan dan Monitoring, Perawatan dan Pemeliharaan gedung
Frekuensi Pelaksanaan	: 12 bulan
Alasan Pemilihan Target	: Shelter yang dikelola oleh DP3APPKB ada 2 (Shelter Perempuan dan Shelter ABH)
Sub Kegiatan	: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Target	: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
Pagu Anggaran	: Rp. 1,082,301,990,-
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Masyarakat, Sekolah di Kota Surabaya
Bentuk Kegiatan	: Fasilitasi Gugus Tugas Kota Layak Anak, Sosialisasi Dinamika Remaja pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Surabaya, Pelaksanaan Hari Anak Nasional
Materi Kegiatan	: Pemenuhan Klaster KLA yang terdiri dari 24 indikator, serta sosialisasi ke sekolah dengan materi permasalahan yang terjadi pada anak
Frekuensi Pelaksanaan	: 17 pelaksanaan kegiatan seputar fasilitasi Gugus Tugas KLA, Sosialisasi Dinamika Remaja dan Forum Anak Surabaya dalam 1 Tahun
Alasan Pemilihan Target	: Dokumen Profil Anak Kota Surabaya yang mencakup 5 Klaster dan 24 Indikator Kota Layak Anak sebagai KIE yang menunjukkan upaya Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak

20. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki dua sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan	: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Target	: Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang
Pagu Anggaran	: Rp. 1,060,943,969,-

- | | |
|-------------------------|--|
| Kelompok Sasaran | : Anak Korban Kekerasan Termasuk Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Trafficking Warga Surabaya |
| Bentuk Kegiatan | : 1. Penerimaan Pengaduan yang dilanjutkan dengan penanganan awal
2. Penerimaan bersumber dari Warga, Command Center, Hotline UPTD PPA, Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, Aparat Penegak Hukum, PD, Kelurahan, Kecamatan, maupun Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Penyelenggaraan operasional UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak)
4. Pendampingan psikologis awal bagi klien |
| Materi Kegiatan | : 1. Pengaduan dan Penanganan Awal melalui telepon / chat menyesuaikan kondisi klien
2. Pendampingan berupa Konseling dengan Konselor |
| Frekuensi Pelaksanaan | : 12 bulan |
| Alasan Pemilihan Target | : Jumlah kasus pengaduan dalam 12 Bulan |
| Sub Kegiatan | : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Target | : Jumlah Anak Mendapat Perlakuan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan 150 layanan |
| Pagu Anggaran | : Rp. 89,516,250,- |
| Kelompok Sasaran | : Anak Korban Kekerasan Termasuk Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Trafficking Warga Surabaya |
| Bentuk Kegiatan | : 1. Memberikan Pendampingan dan Penanganan lanjutan melalui layanan UPTD PPA berupa Pendampingan Psikologis oleh konselor atau Psikolog, Pendampingan Medis pada saat pemeriksaan kesehatan / visum di RS dan atau Puskesmas, Pendampingan Hukum pada saat Mediasi/Sidang/Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan
2. Gelar Kasus Penguatan Pemberian Penanganan Klien
3. Pemenuhan kebutuhan makanan pada saat proses pendampingan |
| Materi Kegiatan | : 1. Pendampingan dan Penanganan yang diberikan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan klien
2. Gelar kasus menyesuaikan permasalahan yang dialami klien |
| Frekuensi Pelaksanaan | : 12 bulan |
| Alasan Pemilihan Target | : Jumlah kasus yang ditangani dalam 12 Bulan |
20. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Keluarga dengan pagu anggaran Rp. 953,142,847,- outputnya terdiri dari :

- Target : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 12 Dokumen
- Kelompok Sasaran : TP PKK Kota Surabaya
- Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Program Kerja Tahun 2024 Kegiatan TP. PKK Kota Surabaya, Monitoring Evaluasi Program Kerja TP. PKK Kota Surabaya, Monitoring Evaluasi Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Pelatihan Kader PKK, Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) ke 51 Tahun 2024, Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota Surabaya dilaksanakan melalui Seleksi Administrasi, dipilih 6 besar untuk ditinjau ke lapangan, Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur Mengadakan Lomba Sehat Lestari Berencana (PHBS) antar PKK Kecamatan Tingkat Kota Surabaya Tahun 2024, Mengikuti Lomba PHBS dalam rangka Kesat Gerak PKK - KKBPK Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2024, Peringatan Hari Kartini TP. PKK Kota Surabaya, Peringatan Hari Ibu TP. PKK Kota Surabaya, Penguatan Pengisian Aplikasi Sayang Warga bagi Kader Surabaya Hebat (KSH) Pembinaan Karakter Keluarga, Pelatihan CEPAK (Cegah Perkawinan Anak) Bagi Kader Pokja I, Revitalisasi Pos Curhat, Mitigasi Bencana Bagi Kader Pokja I, Meningkatkan Pemahaman Tentang Administrasi Kependudukan, Lomba Senam Lansia, PHBI, Penyusunan Program Kerja Pokja ii Tahun 2024, Evaluasi Kegiatan Pokja ii Tahun 2024 Dan Rencana Kerja, Pelatihan Pembentukan BKB Percontohan, Bimbingan Teknis Kelompok BKB Percontohan, Monitoring Dan Evaluasi Kelompok BKB Percontohan, Pembuatan Pelaporan Hasil Monev Kelompok BKB Percontohan, Pelatihan Pos PAUD Terpadu Percontohan Bimtek Pos PAUD terpadu Percontohan, Monitoring dan evaluasi evaluasi Pos PAUD Terpadu Percontohan Pembuatan Pelaporan Hasil Monev Pos PAUD Terpadu Percontohan, Pelatihan Kelompok PRA Koperasi/UP2K PKK Percontohan, Bimbingan Teknis Kelompok PRA Koperasi/UP2K PKK Percontohan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Pra Koperasi/UP2K PKK, Pembuatan Pelaporan Hasil Monev Kelompok PRA Koperasi/UP2K PKK Percontohan, Lomba Mendongeng Bagi Kader BKB, Lomba Cipta Menu Sehat B2SA Catur Warga, Lomba Olahan Pangan Berbahan dasar ikan dalam Pencegahan Stunting, GEBYAR (GErakan Bersama masYARakat) Tebar Benih Ikan, Pemberian Bantuan Tong Budikdamber dan Benih Ikan untuk Kader PKK dalam rangka Peringatan

	<p>Hari Air Tahun 2024, Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Ketua TP. PKK Kecamatan se-Kota Surabaya, Sosialisasi Membudayakan Perilaku Berbusana Sesuai Moral Budaya Indonesia, Lomba Kreasi Batik Lokal antar Kecamatan se-Kota Surabaya dalam rangka Kampanye Aku Cinta Produk Indonesia. Sosialisasi Rumah Sehat Layak Huni, Pelatihan Administrasi Pokja III dan HATINYA PKK Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga ke dalam HATINYA PKK, Peningkatan kapasitas Kader Surabaya Hebat dalam kegiatan posyandu di era pandemi untuk mengatasi stunting, Penguatan pemahaman KSPR untuk pendamping Ibu Hamil, Pemantapan dan pembinaan administrasi pengisian SIP Sosialisasi TISAGALUH dalam penerapan PHBS Sosialisasi pentingnya KB di era adaptasi tatanan baru (Kesehatan Reproduksi pada Remaja), Pemanfaatan tanaman TOGA untuk pengobatan keluarga</p>
Materi Kegiatan	: Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan dalam upaya Pemberdayaan serta Penyediaan Layanan bagi Perempuan di tingkat Kota
Frekuensi Pelaksanaan	: Dalam 1 Tahun dilaksanakan 53 Kali Kegiatan
Alasan Pemilihan Target	: TP PKK merupakan Organisasi yang berfokus dalam mendorong program-program yang dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	13,828,837,805	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	13,998,307,030	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10,546,573,642	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11,184,675,931	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3APPK B	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang /bulan	10,546,573,642	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3APPK B	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	11,184,675,931	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2,724,824,661	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2,272,803,053	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3APPK B	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,724,824,661	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3APPK B	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,272,803,053	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	557,439,502	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	540,828,046	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3APPK B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	557,439,502	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3APPK B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	540,828,046	
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100%	1,762,971,749	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100%	1,584,150,489	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			di sektor ipoleksosbud					di sektor ipoleksosbud			
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%				Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	671,549,895	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	586,142,736	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP3APPK B	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	671,549,895	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP3APPK B	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	586,142,736	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	469,688,874	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	416,538,453	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan	DP3APPK B	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Organisasi	469,688,874	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan	DP3APPK B	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Organisasi	416,538,453	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	621,732,980	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	581,469,300	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	621,732,980	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	581,469,300	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	63.06 %	528,841,261	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	63.06 %	756,779,853	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	160 Orang	301,605,103	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	160 Orang	309,937,084	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	DP3APPK B	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	80 Satuan Pendidikan	301,605,103	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	DP3APPK B	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	80 Satuan Pendidikan	309,937,084	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	227,236,158	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	446,842,769	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	163,036,158	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	149,842,769	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DP3APPK B	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	64,200,000					0	
					0	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DP3APPK B	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	232,800,000	
					0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	DP3APPK B	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	1 Laporan	64,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sistem Informasi Keluarga		Sistem Informasi Keluarga			
4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.10 %	10,127,853,457	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.10 %	11,751,221,240	
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	84%				Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	84%		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	603,000,000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	753,000,000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP3APPK B	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	523,000,000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP3APPK B	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	403,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2			3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
			Pengendalian Program KKBPK	DP3APPK B	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80,000,000			Pengendalian Program KKBPK	DP3APPK B	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80,000,000	
							0			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150,000,000	
							0			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DP3APPK B	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi	120,000,000	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	1,565,113,000			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	1,330,063,000	
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	DP3APPK B	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan	1 Laporan	966,713,000			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga	DP3APPK B	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan	1 Laporan	974,063,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3APPK B	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	598,400,000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3APPK B	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	308,000,000	
					0	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DP3APPK B	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	31 Organisasi	48,000,000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417003 Orang	7,470,240,457	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417003 Orang	9,178,658,240	
	Pengendalian Pendistribusian	DP3APPK B	Jumlah Laporan Pengendalian	1 Laporan	1,769,635,457	Pengendalian Pendistribusian	DP3APPK B	Jumlah Laporan Pengendalian	1 Laporan	1,864,930,240	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DP3APPK B	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	832,955,000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DP3APPK B	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	832,955,000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3APPK B	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	4,867,650,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3APPK B	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	6,426,473,000	
					0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3APPK B	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	54,300,000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	489,500,000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	489,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DP3APPK B	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31 Kampung	489,500,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DP3APPK B	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung	480,500,000	
					0	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	9,000,000	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	615,338,963	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	597,542,389	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	64.51 %				Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	64.51 %		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	193,600,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	188,400,000	
	Penyediaan Layanan	DP3APPK B	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	20 Orang	193,600,000	Penyediaan Layanan	DP3APPK B	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	20 Orang	188,400,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	20 kecamatan	421,738,963	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	20 kecamatan	409,142,389	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	421,738,963	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	409,142,389	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	4,417,328,602	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	17,233,853,626	
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.56 %				Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.56 %		
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	47.50 %				Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	47.50 %		
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	42%				Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	42%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	4,417,328,602	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	17,233,853,626	
			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan				Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan		
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan				Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan				Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	DP3APPK B	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	54 Kelompok	1,065,835,961	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha	DP3APPK B	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	54 Kelompok	1,074,157,885	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2			3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
			Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk					Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPK B	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1,206,994,290			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	DP3APPK B	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	936,140,461	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPK B	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38 Unit	360,000,000			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	DP3APPK B	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	38 Unit	360,000,000	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	DP3APPK B	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	6642 Orang	1,142,249,065			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB,	DP3APPK B	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	6642 Orang	13,948,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan			
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPK B	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	852 Orang	642,249,286	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DP3APPK B	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	852 Orang	915,355,280	
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	246	1,121,807,976	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	246	1,239,560,164	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	1,121,807,976	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	1,239,560,164	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan	DP3APPK B	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	2 Layanan	1,121,807,976	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan	DP3APPK B	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	2 Layanan	1,239,560,164	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2			3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
			Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	946,842,847	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	953,142,847	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Kegiatan	946,842,847		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Kegiatan	953,142,847	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Laporan	946,842,847		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	953,142,847	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	318,399,717	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	270,982,327	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	318,399,717	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	270,982,327	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	318,399,717	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	270,982,327	
10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan Layak Anak	79.87 %	3,468,370,525	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan Layak Anak	79.87 %	3,330,540,663	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	894,253,991	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	817,567,210	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	894,253,991	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	817,567,210	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	2,574,116,534	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	2,512,973,453	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,136,811,900	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,082,301,990	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1,437,304,634	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1,430,671,463	
11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	1,129,026,942	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	1,150,460,219	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap	64.51 %				Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap	64.51 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
				perlindungan khusus anak						perlindungan khusus anak			
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	20 lembaga	1,129,026,942		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	20 lembaga	1,150,460,219	
				Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus					Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	1,023,552,642		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang	1,060,943,969	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPK B	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Layanan	105,474,300		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DP3APPK B	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Orang	89,516,250	
	TOTAL					38,265,619,844	TOTAL					52,866,540,847	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapedalitbang. Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Forum perangkat Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menghasilkan saran dan masukan pada penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta penyelesaian permasalahan yang mendesak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Masukan yang ada tidak berupa usulan program atau kegiatan, akan tetapi penajaman terhadap bentuk pelaksanaan dan sasaran program dan kegiatan yang telah disusun pada rancangan awal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saran dan Masukan pada Forum Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dr. Drs. Martadi, M.Sn (Universitas Negeri Surabaya) saran yang diberikan :
 - 1) Surabaya sudah meraih Kota Layak Anak dan APE kategori Mentor. Program yang dirancang harus mampu mempertahankan capaian tersebut.
 - 2) Upaya mempertahankan bisa dilakukan dengan melalui revitalisasi dan inovasi dengan menekankan program-program prioritas.
 - 3) Akan pikir Renja harus digayutkan dengan visi misi Walikota, arah kebijakan, prioritas, program, kegiatan, dan indikator sehingga lebih sistematis.
 - 4) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat perlu dirumuskan dalam program yang lebih spesifik.
 - 5) Secara umum program sudah lengkap, secara rinci hanya perlu dipetakan jika ada *overlapping* antar bidang dan PD.
 - 6) Program-program inovasi perlu lebih direncanakan, seperti KAS-RPA dan lain-lain.
 - 7) Spirit gotong-royong yang digaungkan oleh Walikota perlu dioptimalkan dengan menguatkan sinergi dengan *stakeholder* seperti NGO dan Perguruang Tinggi.

2. Heri Setiawan, SE, MT (Satpol PP) saran yang diberikan :

Merujuk pada program dan kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar DP3APPKB memberikan perencanaan kepada Satpol PP untuk dapat mendukung kegiatan yang berkaitan atau berhubungan dengan pembiayaan, penyusunan, dan perencanaan, serta pelaksanaan di tahun anggaran berjalan.
3. Dinita (DINKPDAG) saran yang diberikan :

Program kerja di DP3APPKB terkait perempuan dan anak dapat difokuskan pada pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi dan pemahaman bahwa pelaku merupakan orang-orang terdekat. Selain itu juga diperlukan sosialisasi terkait teknis pengaduan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
4. Mas Basuki (DKPP) saran yang diberikan :

Dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak DPRKPP berproses melengkapi fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, PAUD, Penitipan Anak, Taman bermain dan fasilitas lainnya, diharapkan dukungan dari DP3APPKB dalam pewujudan program tersebut. Selain itu, juga perlu mendapat perhatian terkait pembentukan Balai Penyuluh KB di seluruh Rusunawa.
5. Jenni (IPEKB Kota Surabaya) saran yang diberikan :
 - 1) Tarikan aplikasi Sayang Warga terkait pulsa masih banyak ditemukan nomor HP TPK yang terdaftar tidak sesuai.
 - 2) NIK TPK pada aplikasi tersebut masih salah, meskipun apa SK TPK sudah benar.
 - 3) Wilayah kerja di Aplikasi Sayang Warga belum sesuai.
6. Retno Indraswari (BPBD Kota Surabaya) saran yang diberikan :

Program dari BPBD Kota Sorabaya yang sedang berjalan dan berkaitan dengan DP3APPKB adalah terwujudnya SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) dan DTB (Dasawisma Tangguh Bencana). Program SPAB merupakan progam lintas sektoral yang juga berkaitan dengan Dinas Pendidikan.

Tujuan dari SPAB adalah anak-anak memiliki kesadaran dan tangguh terhadap bencana karena anak-anak merupakan kelompok rentan bencana. Sehingga keamanan dan keselamatan anak dapat dijaga.

Pada program DTB perlu digalakkan dengan sasaran ibu-ibu/perempuan yang memiliki peran penting dalam menjaga keluarga namun sekaligus menjadi salah satu kelompok yang rentan bencana.

7. Dr. Sofyan Rizalanda, nakes (Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur) saran yang diberikan :
 - 1) MCPR Kota Surabaya berada dibawah nasional yakni 59%. Perlu stimulasi yang lebih konkret dengan kegiatan KB sehingga dapat meningkat.
 - 2) Pengelolaan DAK Fisik dan BOKB Tahun 2023 perlu dilakukan dengan cermat, sehingga Surabaya memiliki alokasi DAK Fisik dan BOKB 23 Miliar di tahun 2023.
 - 3) Kota Surabaya belum memiliki balai penyuluhan KB, perlu upaya agar Surabaya segera memiliki balai tersebut dengan berkoordinasi intens dengan BKKBN. BKKBN akan memandu secara keseluruhan dan pembiayaan pembangunan Balai Penyuluhan KB berasal dari DAK Fisik KB.
 - 4) Pelayanan KB di Kota Surabaya perlu ditingkatkan.
8. Anton Setiawan (Dinas Pendidikan) saran yang diberikan :

Terkait penanganan anak putus sekolah (anak yang memiliki masalah) diharapkan DP3APPKB melaksanakan pendampingan klien terutama terkait kesiapan mental dan psikologi klien sebelum melanjutkan sekolah. Pendampingan ini dilakukan sebelum masuk sekolah dan selama klien bersekolah untuk meminimalisir putus sekolah kembali.
9. Suharto Ahmad (Kelompok KB Pria) saran yang diberikan :
 - 1) Fasilitas Pelayanan MOP perlu untuk ditingkatkan.
 - 2) Penyediaan brosur MOP agar disiapkan dan dikirim ke PKB Kecamatan.
 - 3) Diharapkan SK Ketua Kelompok KB Pria segera disusun.
 - 4) Pertemuan berkala kelompok KB Pria se Surabaya.
10. Feriz Andrian Saputro, SE (Bappedalitbang) saran yang diberikan :
 - 1) Target kinerja tahun 2024 jika memungkinkan beberapa target dilaksanakan ditahun 2023. Mengingat hasil capaian 2024 harus diselesaikan sebelum akhir tahun karena adanya PILKADA serentak.
 - 2) Hasil evaluasi dan monitoring indikator Perangkat Daerah tahun 2022 secara garis besar sudah baik, akan tetapi masih ada yang belum tercapai 100% untuk ditingkatkan capaiannya di tahun 2023.
 - 3) Terkait isu strategis tahun 2023 harap focus pada KLA Nasional penuh dan KLA Dunia, *supporting* capaian IPM, dan capaian zero stunting.
11. Indah W. (Paguyupan Kader IMP Kota Surabaya) saran yang diberikan :
 - 1) Forum anak ditingkat kecamatan sampai kelurahan perlu diaktifasi secara massif.

- 2) Paguyupan Kader IMP sudah difasilitasi dalam pertemuan se Kota Surabaya dan diharapkan program tersebut dan kegiatan gropyokan tetap berlanjut untuk menunjang pencapaian pelayanan KB.
 - 3) Kegiatan gropyokan tidak sekedar bertujuan mencari akseptor KB tetapi dapat juga disinergikan dengan kegiatan yang ada di Forum Anak Surabaya.
12. Dita Amalia (PLATO) saran yang diberikan :
- Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dengan cara berikut.
- 1) Adanya *safeguarding policy* kebijakan perlindungan anak di Kota Surabaya.
 - 2) Memperkuat sistem pelayanan UPTD PPA, seperti pengembangan SPM dengan alur layanan dan koordinasi, manajemen kasus, SOP Layanan (penjangkauan, *screening*, *assessment*, intervensi layanan, dan terminasi integrasi sosial).
 - 3) Memperkuat sistem koordinasi dan kerjasama antar PD dan dengan *stakeholder* untuk membangun Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak dan CFCI.
 - 4) Memperkuat monitoring dan evaluasi untuk dapat melihat efektifitas program (melihat indikator capaian tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas).
13. Juli Artyana, ST (Dinas Lingkungan Hidup) saran yang diberikan :
- Dalam upaya pencegahan stunting diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Hal tersebut dapat terwujud melalui sinergi pemerintahan dengan masyarakat untuk mewujudkan Kota Surabaya Zero Stunting.
14. Zura Calista Susilo (Forum Anak Surabaya) saran yang diberikan :
- 1) Klaster 1. Hak Sipil dan Kebebasan
 - Kurangnya wadah partisipasi dalam menyampaikan pendapat.
 - Kurangnya layanan informasi layak anak.
 - Banyak anak belum memiliki KIA.
 - Forum Anak / Organisasi kurang maksimal.
 - 2) Klaster 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - Anak mendapat tekanan untuk mencapai target orang tua, perlu optimalisasi Sekolah Ramah Anak.
 - Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di sekitar anak.
 - RBRA masih sedikit.
 - 3) Klaster 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - Peraturan larangan jual beli rokok perlu diperketat.
 - Kurangnya kawasan bebas rokok.
 - Pemahaman gaya hidup sehat dan gizi seimbang.

- Fasilitas penanganan kesehatan mental.
 - Kurangnya kualitas pelayanan ramah anak di Puskesmas.
- 4) Klaster 4. Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- *Bullying* / senioritas di sekolah.
 - Sekolah Ramah Anak (SRA) perlu diterapkan dengan baik.
- 5) Klaster 5. Perlindungan Khusus
- Kekerasan pada anak.
 - Kasus pornografi, seksual, penyimpangan seksual pada anak.
 - Banyak pekerja anak dan anak terlantar yang hidup di jalanan.
15. Fendina A. (BPBJAP) saran yang diberikan :
- Beberapa hal yang perlu disosialisasikan terhadap masyarakat khususnya orang tua sebagai berikut.
- 1) Pendidikan agama dari lingkungan rumah diperkenalkan sejak dini.
 - 2) Orang tua lebih mengarahkan anak sejak dini memberikan ruang untuk putra putri memiliki kegiatan diluar kegiatan sekolah, seperti olah raga, kesenian, dan lain sebagainya agar bakat anak dapat terfasilitasi. Hal tersebut dapat membuat anak tetap berada pada lingkungan yang positif.
 - 3) Selalu ada apresiasi positif dari orang tua kepada anak-anak agar selalu termotivasi untuk berprestasi.
 - 4) Memberi perhatian pada hal paling kecil kepada anak sehingga anak tidak pernah merasa kurang perhatian.
16. Finda Muthia Hanum, S.KM (Perwakilan PKB wilayah Timur) saran yang diberikan :
- 1) Penambahan tenaga penyuluh KB di Kota Surabaya, mengingat banyaknya tenaga penyuluh KB yang akan purna tugas.
 - 2) Pendirian Balai Penyuluh KB di setiap Kecamatan di Kota Surabaya.
 - 3) Penambahan tenaga non PNS untuk membantu kinerja penyuluh KB berkaitan dengan tugas yang bersifat administrasi.
17. Elien Dwi Septalita, S.Km (Perwakilan PKB wilayah Selatan) saran yang diberikan :
- Penambahan tenaga lapangan di masing-masing Kecamatan agar dapat mengakomodir seluruh program baik dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur maupun DP3APPKB mengingat Penyuluh KB yang ada saat ini mayoritas sudah mendekati masa pensiun sehingga secara keseluruhan dapat bekerja lebih optimal.
18. Reisy Anggraeni (TP PKK Kota Surabaya Pokja III) saran yang diberikan :

Penyusunan program kerja PKK tidak jauh berbeda dari program kerja tahun 2023 karena penyusunan rencana program tahun 2024 baru dimulai bulan Juli 2023. Adapun pembagian program kerja berdasarkan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut.

- a. Pokja I : Ketahanan Mental Keluarga
- b. Pokja II : Pendidikan dan Keterampilan, Koperasi / UP2K PKK
- c. Pokja III : Ketahanan Pangan Keluarga
- d. Pokja IV : Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan
- e. Bidang Sekretariat : Lomba-lomba PKK dan Acara Peringatan Hari Besar Nasional.

Diharapkan PKK dapat lebih bersinergi dengan DP3APPKB maupun PD lainnya.

19. Latifah (Perwakilan PKB wilayah Pusat) saran yang diberikan :

Pelayanan KB MOW di RS. Soewandi terkait *screening* diharapkan memiliki alur yang praktis sehingga kader dan calon akseptor menerima pelayanan yang efektif dan efisien.

20. Winiati Utami (TP PKK Kota Surabaya Pokja II) saran yang diberikan :

Banyak Program PKK khususnya di pokja II yang berkaitan dengan DP3APPKB dan perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut.

- 1) SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat)

Peran Orang tua sangat dibutuhkan untuk penurunan kasus stunting terlebih untuk mencapai Surabaya Zero Stunting.

Sekolah Orang Tua Hebat dapat menjadi sarana belajar atau pembinaan bagi orang tua khususnya ibu dalam pola asuh anak. Pokja II terdapat / berkaitan dengan BKB (Bina Keluarga Balita) Melalui peningkatan pembinaan BKB dapat menguatkan peran orang tua dilingkungan terdekat. Diharapkan orang tua lebih memperhatikan dan menyiapkan putra-putrinya menjadi generasi / bertumbuh seperti yang diharapkan dalam hal ini adalah kebutuhan kebutuhan anak seperti ekonomi, sosial akhlak dan kepribadian.

- 2) Pembentukan / Peningkatan UP2K

UP2K Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga) memiliki program yang inovatif diharapkan dapat mengentas kemiskinan / Gamis.

UP2K diharapkan dapat menumbuhkan upaya berwirausaha bagi keluarga miskin.

- 3) Pembentukan / Peningkatan Koperasi PKK

- 4) Pembentukan / pengaktifan kembali Forum Anak di tingkat Kelurahan dan Kecamatan agar dapat menjangkau aspirasi / masalah pada anak-anak.
21. Erina K. (DISKOMINFO) saran yang diberikan :
Program-program yang ada pada DP3APPKB. Kominfo akan selalu mendukung terkait publikasi serta peliputan dalam kegiatan DP3APPKB seperti Kota Layak Anak (KLA).
22. Yulita (Perwakilan PKB wilayah Barat) saran yang diberikan :
Pemenuhan hak anak terkait pendewasaan usia perkawinan dalam fokus mengajak Tokoh Agama untuk mensosialisasikan tentang usia perkawinan dipertemuan-pertemuan keagamaan sehingga tidak ada lagi para orang tua yang memaksa anak untuk melakukan perkawinan dini. Tokoh agama juga bisa berperan dalam memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak.
23. Sunarko, S.Ag, M.Si (Dinas Sosial) saran yang diberikan :
Berkaitan dengan korban kekerasan terhadap anak perempuan (pemeriksaan) menurut mitra dinsa sakti peksos Bu Nurul, bahwa anak-anak hasil korban kekerasan seksual berdampak perubahan perilaku terhadap korban. Para korban akan mencari mangsa baru karena ketagihan untuk kebutuhan biologis nya.
Tentunya ini menjadi PR Bersama untuk di sosialisasikan ke Kecamatan dan Kelurahan untuk di sampaikan kepada masyarakat. Sebab permasalahan tidak berhenti tapi akan menjadi permasalahan luas ke masyarakat dan orang tua harus selalu mengawasi dan lebih protektif terhadap anak-anaknya.
24. Lestari Dian Rachma (Kampung KB) saran yang diberikan :
Adanya dukungan anggaran operasional untuk kampung KB, sehingga 8 pokja bisa berkegiatan atau melakukan pembinaan terhadap sasaran

2.5.2 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musrenbang RKPD kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, Klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;

2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan;
3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat PD provinsi dan pejabat PD kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota. Hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

2.5.3 Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memiliki 7 (tujuh) Prioritas Nasional sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam), dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2022, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

RKP 2023 dijabarkan dalam 8 (delapan) Kebijakan Prioritas Pembangunan sebagai berikut.

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sedangkan indikator sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,3-5,9 (%)
2. Tingkat Kemiskinan dengan target 7,5-8,5 (%)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 5,3-6,0 (%)
4. Rasio Gini dengan target 0,375-0,378
5. Indeks Pembangunan Manusia dengan target 73,31-73,49
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan target 27,02 (%)
7. Nilai Tukar Petani dengan target 103-105
8. Nilai Tukar Nelayan dengan target 106-107

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Agenda Pembangunan RKP 2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pada kebijakan prioritas pembangunan ke-2 yaitu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kesehatan dan pendidikan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Strategis Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya;
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.2.1 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan masing-masing tujuan ditetapkan satu atau beberapa sasaran strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya, memiliki sasaran:
 - b. Mewujudkan keluarga yang berkualitas;
 - c. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
2. Tujuan : Meningkatkan Pengarus Utamaan Gender, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak, memiliki sasaran :
 - a. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Program dan kegiatan harus selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang maupun Forum Perangkat Daerah.
2. Program dan kegiatan harus selaras dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah Kota Surabaya.
3. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT, anak berhadapan dengan hukum, dan *trafficking* (perdagangan orang). Pemerintah Kota Surabaya telah menciptakan sistem untuk melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan kepada perempuan melalui peningkatan kapasitas.

Selain itu, Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menjadi Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan tahun 2024. Isu-isu berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Perubahan RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, hal ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan permasalahan perempuan dan anak antara lain trafficking.
2. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di masyarakat sampai ke akar masalah.
3. Belum adanya pendokumentasian intervensi ketuntasan kasus permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yang terintegrasi lintas OPD.
4. Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas belum sepenuhnya optimal.
5. Belum optimalnya anggaran responsif gender (ARG) pada APBD sebagai bukti intervensi responsif gender pada masyarakat.
6. Masih adanya ketimpangan gender yang terlihat dari pemahaman konsep dan praktis dari pengarusutamaan (PUG) sendiri yang masih cenderung mendefinisikan PUG sebagai program-program yang terkait perempuan semata.
7. Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui perwujudan Kota Layak Anak yang mendunia.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmet need).
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
4. Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja / beraktivitas di Kota Surabaya.
5. Pencegahan balita pra stunting memerlukan intervensi yang terintegrasi dengan OPD lain sehingga tidak ada lagi balita stunting baru.

4.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana sebagian menjadi urusan yang sesuai dengan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2024, rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun berdasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran terdiri dari 11 Program, 21 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan.

4.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menyusun Program dan kegiatan untuk tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan : Pelembagaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

9. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan : Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Sub Kegiatan : Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Sub Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

11. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sub Kegiatan : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan diuraikan secara detail pada Tabel 4.1 tentang rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	
1	2			3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		100%	Rp 13.998.307.030			100% Rp 17.123.805.319
2.08.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	Rp 11.184.675.931			100 % Rp 12.652.515.524
2.08.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/ bulan	Rp 11.184.675.931			24 Orang/ bulan Rp 12.652.515.524
2.08.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100 %	Rp 2.272.803.053			100 % Rp 3.902.865.450
2.08.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Rp 2.272.803.053			5 Paket Rp 3.902.865.450
2.08.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah		100 %	Rp 540.828.046			100 % Rp 568.424.345
2.08.01.2.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Laporan	Rp 540.828.046			6 Laporan Rp 568.424.345
2.08.02				Persentase organisasi wanita yang mendapatkan		100%	Rp 1.584.150.489			100% Rp 2.238.330.002

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud						
					Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%				100%	
2.08.02.2.01				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	Rp 586.142.736			3 Dokumen	Rp 753.478.983
2.08.02.2.01.0003				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	Rp 586.142.736			58 Perangkat Daerah	Rp 753.478.983
2.08.02.2.02				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	Rp 416.538.453			600 Orang	Rp 449.463.917
2.08.02.2.02.0002				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	31 Organisasi	Rp 416.538.453			31 Organisasi	Rp 449.463.917

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.02.2.03					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		21 Kegiatan	Rp 581.469.300			21 Kegiatan	Rp 1.035.387.102
2.08.02.2.03.0002					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		740 Orang	Rp 581.469.300			740 Orang	Rp 1.035.387.102
2.08.03					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam		100%	Rp 597.542.389			100%	Rp 684.623.414
						Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan		64.51 %				80.64 %	
2.08.03.2.02					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		20 kasus	Rp 188.400.000			20 kasus	Rp 203.392.252
2.08.03.2.02.0001					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang		20 Orang	Rp 188.400.000			20 Orang	Rp 101.561.688

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
					Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapatkan Layanan Pengaduan						
2.08.03.2.03					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	20 kecamatan	Rp 409.142.389			25 kecamatan	Rp 422.056.351
2.08.03.2.03.0004					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 409.142.389			1 Dokumen	Rp 422.056.351
2.08.04					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	246	Rp 1.239.560.164			282	Rp 589.528.007
2.08.04.2.03					Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	Rp 1.239.560.164			12 laporan	Rp 589.528.007
2.08.04.2.03.0001					Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	Rp 1.239.560.164			2 Layanan	Rp 589.528.007
2.08.05					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	Rp 270.982.327			100%	Rp 449.683.488
2.08.05.2.01					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	Rp 270.982.327			58 Lembaga	Rp 449.683.488

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
				Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.05.2.01.0001				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	Rp 270.982.327			1 Dokumen	Rp 449.683.488
2.08.06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak		79.87 %	Rp 3.330.540.663			92.85 %	Rp 3.743.914.966
2.08.06.2.01				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak		1 kegiatan	Rp 817.567.210			1 kegiatan	Rp 871.931.044
2.08.06.2.01.0001				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		20 Organisasi	Rp 817.567.210			20 Organisasi	Rp 871.931.044
2.08.06.2.02				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak		3 kegiatan	Rp 2.512.973.453			3 kegiatan	Rp 2.871.983.922
2.08.06.2.02.0001				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	Rp 1.430.671.463			10 Orang	Rp 1.500.976.643

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.06.2.02.0003				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp 1.082.301.990			1 Dokumen	Rp 1.371.007.279
2.08.07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam		100%	Rp 1.150.460.219			100%	Rp 1.696.117.424
					Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak		64.51 %				80.64 %	
2.08.07.2.02				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak		20 lembaga	Rp 1.150.460.219			25 lembaga	Rp 1.487.308.521
					Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus		150 kasus				150 kasus	
2.08.07.2.02.0005				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		150 Orang	Rp 1.060.943.969			150 Orang	Rp 1.297.251.050
2.08.07.2.02.0006				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		150 Orang	Rp 89.516.250			150 Orang	Rp 190.057.471

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakatat		100%	Rp 953.142.847				Rp 0
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		53 Kegiatan	Rp 953.142.847			53 Kegiatan	Rp 0
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		12 Dokumen	Rp 953.142.847			12 Dokumen	Rp 953.142.847
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan		63.06 %	Rp 756.779.853			81.10 %	Rp 380.744.476
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan		160 Orang	Rp 309.937.084			170 Orang	Rp 225.665.357

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
					dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							
2.14.02.2.01.0009					Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		80 Satuan Pendidikan	Rp 309.937.084			80 Satuan Pendidikan	Rp 225.665.357
2.14.02.2.02					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		58 Perangkat Daerah	Rp 446.842.769			58 Perangkat Daerah	Rp 155.079.119
2.14.02.2.02.0009					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		1 Laporan	Rp 64.200.000			1 Laporan	Rp 64.200.000
2.14.02.2.02.0012					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		1 Laporan	Rp 232.800.000			1 Laporan	Rp 232.800.000
2.14.02.2.02.0013					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		1 Dokumen	Rp 149.842.769			1 Dokumen	Rp 141.202.718
2.14.03					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		18.10 %	Rp 11.751.221.240			17.85 %	Rp 9.711.611.664
					Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi		84%				85%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
					dalam penggunaan alat kontrasepsi							
2.14.03.2.01				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya		31 Kecamatan	Rp 753.000.000			31 Kecamatan	Rp 350.049.000
2.14.03.2.01.0008				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		1 Laporan	Rp 80.000.000			1 Laporan	Rp 175.024.500
2.14.03.2.01.0011				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		1 Laporan	Rp 403.000.000			1 Laporan	Rp 175.024.500
2.14.03.2.01.0012				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		1 Dokumen	Rp 150.000.000			1 Dokumen	Rp 150.000.000
2.14.03.2.01.0014				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		31 Organisasi	Rp 120.000.000			31 Organisasi	Rp 120.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
2.14.03.2.02					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP		12 Kali	Rp 1.330.063.000			12 Kali	Rp 2.570.135.540
2.14.03.2.02.0004					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		1566 Orang	Rp 308.000.000			1566 Orang	Rp 1.743.310.415
2.14.03.2.02.0005					Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		31 Organisasi	Rp 48.000.000			31 Organisasi	Rp 48.000.000
2.14.03.2.02.0006					Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		1 Laporan	Rp 974.063.000			1 Laporan	Rp 826.825.125
2.14.03.2.03					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan		417003 Orang	Rp 9.178.658.240			417050 Orang	Rp 4.312.056.664

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
					serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	alat kontrasepsi modern (mCPR)						
2.14.03.2.03.0001					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Rp 1.864.930.240			1 Laporan	Rp 2.243.739.187
2.14.03.2.03.0003					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	Rp 6.426.473.000			1950 Orang	Rp 1.662.316.596
2.14.03.2.03.0006					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	Rp 832.955.000			19 Unit	Rp 406.000.881
2.14.03.2.03.0008					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Rp 54.300.000			1 Laporan	Rp 54.300.000
2.14.03.2.04					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	Rp 489.500.000			4 Laporan	Rp 2.479.370.460
2.14.03.2.04.0002					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	Rp 9.000.000			1 Dokumen	Rp 9.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		31 Kampung	Rp 480.500.000			31 Kampung	Rp 2.479.370.460
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median usia kawin pertama perempuan	Rp 17.233.853.626			21 tahun	Rp 4.417.688.689
				Persentase balita yang mengikuti PAUD				41.57 %	
				Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial				51.63 %	
				Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya				43%	
2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	Rp 17.233.853.626			10 Kelompok	Rp 4.417.688.689
				Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)				1 Laporan	
				Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	
				Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.01.0017				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1 Laporan	Rp 936.140.461			1 Laporan	Rp 1.389.316.073
2.14.04.2.01.0018				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		38 Unit	Rp 360.000.000			38 Unit	Rp 403.664.729
2.14.04.2.01.0019				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		852 Orang	Rp 915.355.280			852 Orang	Rp 574.141.339
2.14.04.2.01.0024				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga		6642 Orang	Rp 13.948.200.000			6642 Orang	Rp 966.749.016

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
2.14.04.2.01.0028		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		54 Kelompok	Rp 1.074.157.885			54 Kelompok	Rp 1.083.817.532
TOTAL					Rp 52.866.540.847				Rp 40.768.063.735

*Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam prakiraan maju rencana th.2025 mempertimbangkan prediksi inflasi dan prediksi kenaikan UMK.

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rancangan awal RKPD tahun 2024. Dokumen Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan disempurnakan menjadi dokumen Renja berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 8 Agustus 2023

KEPALA DINAS,



Dra. IDA WIDAYATI MM

Pembina Tk.I

196809081996022002